

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018:2) Sektor publik memiliki pengertian yang beragam dikarenakan dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda – beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai sesuatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga–lembaga tinggi negara dan departemen–departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek – proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut halim dan kusufi (2018) mengatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Dalam siklus akuntansi sektor publik laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Dan berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target

pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Berikut ini adalah siklus akuntansi keuangan sektor publik menurut Bastian (2010 : 318).

1. Analisis bukti transaksi
2. Pencatatan data transaksi
3. Pengikhtisaran
4. Laporan
5. Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain

Selama satu periode akuntansi, transaksi yang dicatat dan dikelompokkan kedalam buku besar kemudian berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya (Sari, 2015).

2.1.1.1 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2018) Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun publik untuk tujuan – tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks. Komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor:

1. Faktor ekonomi meliputi antara lain: a) pertumbuhan ekonomi b)tingkatinflasi c)pertumbuhan pendapatan per kapital d) struktur produksi e) tenaga kerja f) arus modal dalam negeri g) cadangan devisa h) nilai tukar mata uang i) utang dan bantuan luar negeri j) infrastruktur k) teknologi l)kemiskinan dan kesenjangan ekonomi m) sektor informal
2. Faktor politik meliputi antara lain: a) hubungan negara dan masyarakat b)legitimasi pemerintah (kewewenangan) c) tipe rezim yang berkuasa (tata pemerintah yang berkuasa) d)ideologi negara (sarana pemersatu) e) elit politik dan massa f) jaringan internasional g) kelembagaan
3. Faktor kultural meliputi antara lain: a) keragaman suku, ras, agama, bahasadan budaya b) sistem nilai di masyarakat c) historis d) sosiologi masyarakat e) karakteristik masyarakat f) tingkat pendidikan
4. Faktor demografi meliputi antara lain: a) pertumbuhan penduduk b) strukturusia penduduk c) migrasi d) tingkat kesehatan

Menurut Bastian (2014:8) akuntansi sektor publik terdiri dari elemen – elemen berikut:

a. Perencanaan publik

Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat dimasa depan melalui urutan pilihan yang memperhitungkan sumber daya yang tersedia (UU RI No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 1 poin 1). Proses perencanaan yang dilakukan ini akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, perencanaan

mebutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas dan diterimanya arah serta tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian perencanaan diatas, inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Dalam hal ini, tujuan publik adalah kesejahteraan publik itu sendiri. Jadi tujuan perencanaan publik adalah perencanaan pencapaian kesejahteraan publik secara bertahap dan sistematis. Ini berarti bahwa perencanaan publik merupakan ilmu yang mempunyai karakteristik tersendiri.

b. Penganggaran publik

Berdasarkan penjelasan UU No 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak akan berlebihan atau wajar – wajar saja jika dikatakan bahwa pengelola/pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

Kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan oleh tiga faktor, yang *pertama*, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat departemen atau lembaga pelaksana tertinggi; *kedua*, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politik berbagai lembaga; dan *ketiga*, akurasi perencanaan, terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik review atas prakira anggaran.

c. Realisasi anggaran publik

Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiatan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah dirancang dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran publik juga menunjukkan pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses – proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses sangat terkait dengan kualitas keluaran atau output. Realisasi anggaran terangkai dari suatu siklus yang terdiri dari kegiatan persiapan, proses pelaksana, dan penyelesaian.

d. Pengadaan barang dan jasa publik

Kata “pengadaan menurut kamus indonesia (*reality publisher* 2008) mengandung arti proses, cara, tindakan mengadakan; atau proses, cara, tindakan menyediakan sesuatu. Sedangkan kata “barang” mengandung arti benda yang berwujud, dan kata “jasa” berarti tindakan yang baik serta berguna bagi orang, kelompok masyarakat, bangsa, dan negara; pertolongan yang sangat berguna ; perbuatan memberikan pelayanan atau servis kepada pelanggan; serta aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya, yang dapat dijual kepada pelanggan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan.

e. Pelaporan keuangan sektor publik

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk mengembangkan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan dilengkapi oleh catatan atas laporan keuangan atau laporan tambahan lainnya, seperti laporan tahunan dan prospektus.

f. Audit sektor publik

Dalam pembicaraan luas, pemeriksaan atau auditing merupakan suatu investigasi independen terhadap beberapa aktifitas khusus. Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakkan makna akuntabilitas didalam pengelolaan sektor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelolaan aset negara lainnya, atau organisasi publik nonpemerintah seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi ditempat peribadatan. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan

dengan prinsip akuntansi berterima umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau, dalam kondisi tertentu, menyangkal suatu opini.

Sebagai suatu proses, audit berhubungan dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Bagi auditor dan pengawas, memahami terlebih dahulu sistem akuntansi yang dipakai oleh organisasi publik merupakan hal yang penting. Agar pemeriksaan lebih efisien, efektif, dan ekonomis, organisasi publik juga harus memahami bagaimana mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan audit yang akan dilakukan auditor.

g. Pertanggung jawaban publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan kepuasan dari para pemimpin atau pengelolaan organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

2.1.1.2 Indikator Akuntansi Sektor Publik

Berikut ini adalah indikator dari siklus akuntansi keuangan sektor publik. Menurut Bastian (2010:318 -319) siklus akuntansi keuangan sektor publik sebagai berikut:

- 1) Transaksi, persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain

Pengertian transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksudkan adalah transaksi antara

organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi yang terjadi inilah yang nantinya akan di laporkan dalam laporan keuangan organisasi.

2) Analisis bukti transaksi

Dalam satuan transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

3) Mencatat data transaksi

Seperti telah dijelaskan diatas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal.

4) Mengikhtisarkan

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing – masing. Hal inilah yang disebut dengan *posting*.

5) Laporan

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan di kelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya.

2.1.2 Pengendalian Internal

Menurut (Romney, 2020:226) Pengendalian internal (*internal control*) adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah tercapai.

- a. Mengamankan aset – mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan, atau penempatan yang tidak sah.
- b. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akrual dan wajar.
- c. Memberikan informasi yang akrual dan reliabel.
- d. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- e. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.
- f. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.
- g. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal adalah sebuah proses karena menyebar ke seluruh aktivitas pengoperasian perusahaan dan merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen. Pengendalian internal memberikan jaminan memadai jaminan menyeluruh yang sulit dicapai dan terlalu mahal.

Menurut (Mamuaja, 2016) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan,

pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan. Pengawasan internal termasuk salah satu bagian dari pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. (mulyadi : 183), mendefinisikan sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Rama dan Jones (2008) yang diterjemahkan oleh M. Slamet Wibowo menjelaskan, pengendalian internal (*internal control*) adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen dan personal lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian dan peraturan yang berlaku.

COSO adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan staff, untuk membuat *reasonable assurance* mengenai:

- a. Efektifitas dan efisiensi operasional
- b. Reabilitas pelaporan keuangan
- c. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan yang menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagaimana laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.

Berdasarkan beberapa pengertian pengendalian diatas, terdapat beberapa konsep dasar, diantaranya:

1. Pengendalian internal adalah suatu proses. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan menjadi bagian yang tidak dipisahkan, bukan sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Pengendalian internal dilaksanakan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya terbentuk kebijakan manual saja tetapi merupakan orang pada berbagai tingkatan organisasi, termasuk dewan direksi, manajemen, dan personal lainnya.
3. Pengendalian internal dapat diharapkan untuk menyediakan hanya keyakinan yang memadai. Maksudnya, yaitu bukan keyakinan yang mutlak, kepada manajemen dan dewan direksi suatu entitas karena keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan perlunya untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat relative dari pengadaan pengendalian.
4. Pengendalian internal diarahkan pada pencapaian tujuan. Tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasional.

2.1.2.1 Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) menurut UU No. 60 Tahun 2008

- a. Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan

keuangan, pengaman aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

- b. sistem pengendalian internal pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. pengawasan internal adalah seluruh kegiatan audit, rewiw, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggara tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Unsur – Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah UU No 60 tahun 2008 Umum SPIP terdiri atas unsur:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Resiko;
- c. Kegiatan Pengendalian; dan
- d. Pemantauan Pengendalian Internal

2.1.2.2 Indikator Pengendalian Internal

Menurut Suanda & Dailibas (2013:6-9) indikator pengendalian internal terdiri dari lima komponen sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian

merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur.

b. Penaksiran risiko

Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka

e. Pemantauan pengendalian internal

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu.

2.1.3 Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Menurut Mulyadi (2015:63) kinerja (prestasi kinerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan menurut Sutrisno (2015:151) kinerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melakukan aktivitas kerja.

Berdasarkan pendapat diatas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing – masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2.1.3.1 Manfaat Kinerja Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2018:122) bahwa manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk kinerjamanajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah di tetapkan.
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja danmembandingkannya dengan targer kinerja serta melakukan tindakkan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward&punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.3.2 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2018:121) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud sebagai berikut:

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk dapat membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan aktivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik.
- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Ukuran kinerja sektor publik di maksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.3.3 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor – faktor keberhasilan utama organisasi (*critical success factors*).

Menurut mardiasmo (2018:131), value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Salah satu tuntutan terhadap

organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap penerapan value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik yang memungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering di sebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati – hati atau cermat (*prudence*) dan tidak ada pemborosan.

2. Efisiensi

Menghubungkan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. indikator tersebut memberikan informasi tentang konversi masukan menjadi keluaran (yaitu efisien dari proses internal).

3. Efektivitas

Menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.1.4 Hubungan Antar Variabel

2.1.4.1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU

Akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapatkan porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efektif dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Penerapan akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap good governance. Pengaruh penerapan akuntansi pemerintah menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi pemerintah maka kualitas informasi akuntansi akan semakin tinggi pula. Penerapan akuntansi pemerintah yang baik dan berkualitasnya informasi akuntansi menunjukkan adanya kinerja pemerintah yang baik pula (Saranggih, 2014:32).

Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintah, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintah yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan – kebijakan yang dilakukan pemerintah (haryanto, dkk., 2017:1).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, instansi pemerintah telah melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keuangan kepada publik. Laporan yang dibuat

kemudian diaudit untuk mengetahui kebenarannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian diatas, diduga bahwa peranan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU.

2.1.4.2 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU

Sistem pengendalian internal artinya suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajemen publik menilai pencapaian suatu strategi menilai alat ukur material dan non material. Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya. Proses integral pada tindakan dan kegiatan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

penelitian ini sejalan dengan Ana (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah sangat signifikan. Dimana semakin banyak sistem pengendalian internal pemerintah, maka kinerja pemerintah juga semakin baik.

Selain itu pelaksanaan pengendalian dapat efektif apabila ada komitmen diantara pihak-pihak yang terkait dengan organisasi, baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini dimaksudkan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik (Nasir & Oktari, 2011)

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten OKU dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, No, Tahun	Variabel yang diteliti, alat analisis, hasil penelitian	Persamaan	perbedaan
1	Bambang Pamungkas	Pengaruh akuntansi sektor publik dan pengawasan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan dan <i>implikasinya</i> terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen. Volume 12 (2) Tahun 2012	Variabel: Penerapan Akuntansi Sektor Publik, pengawasan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan dan <i>implikasinya</i> terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Alat analisis: Regresi Linear Berganda Hasil analisis: hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan. Penerapan akuntansi keuangan sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda • Variabel X_1 yaitu akuntansi sektor publik • Variabel Y kinerja instansi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian • Tahun Penelitian • Variabel X kualitas laporan keuangan

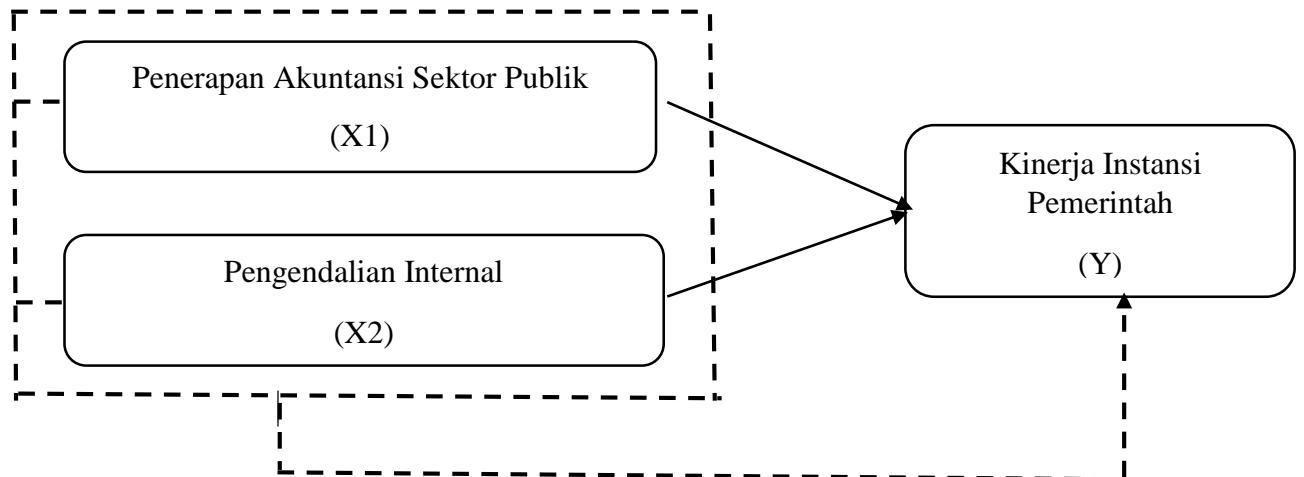
2	Santoso & Pambelum	<p>Penerapan akuntansi sektor publik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pencegah <i>fraund</i></p> <p>Jurnal Administrasi bisnis. Volume 4 (1) Tahun 2008</p>	<p>Variabel: Penerapan akuntansi sektor publik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pencegah <i>fraund</i></p> <p>Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</p> <p>Hasil Analisis: Secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pencegah <i>fraud</i> baik secara parsial maupun secara bersama – sama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda • Variabel X yaitu akuntansi sektor publik • Variabel Y yaitu kinerja instansi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian • Tahun Penelitian
3	Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Yaman Rauf	<p>Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Jurnal jambura accounting review. Volume 2 (2) Tahun 2021</p>	<p>Variabel: Pengaruh sistem pengendalian internal, kinerja instansi pemerintah</p> <p>Alat Analisis: Regresi linear berganda</p> <p>Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda • Variabel X yaitu sistem pengendalian internal • Variabel Y yaitu kinerja instansi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Tahun penelitian

4	Brejita Mamuaja	Analisis Eektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Jurnal EMB. Volume 4 (1) Tahun 2016	Variabel: Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Instansi Pemerintah Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado Alat analisis: Regresi Linear Berganda Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang ditetapkan oleh Dinas DISPENDA Kota Manado telah efektif dan memadai. Sebaik petugas – petugas DISPENDA melakukan pemeriksaan dan pemantauan penerimaan sesering mungkin, sehingga jika terjadi masalah dapat diketahui secara dini.	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda • Variabel X yaitu sistem pengendalian internal • Variabel Y yaitu kinerja instansi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian • Tahun Penelitian
5	Nurhaini Salamah	Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kabupaten Bogor	Variabel: Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah, hal ini disebabkan SKPD kabupaten Bogor belum mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan – perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Akuntabilitas dari masing – masing SKPD masih rendah sehingga akan mempengaruhi kinerjanya. Pada pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan, sehingga untuk meningkatkan kinerja adalah dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda • Variabel X yaitu pengaruh akuntansi sektor publik • Variabel Y yaitu kinerja instansi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi Penelitian • Tahun Penelitian

			<p>meningkatkan pengawasan yang optimal akan berdampak baik pada kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah</p>		
--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambaran kerangka pemikiran ini dapat lebih jelas dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

Ket: —————> **Garis parsial**
 - - - - -> **Garis Simultan**

2.4 Hipotesis

Menurut Arikunto (Arikunto, 2012:60) hipotesis di identifikasikan sebagai persyaratan yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang di ajukan dalam penelitian. Hipotesis adalah sebuah jawaban sementara, masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: diduga ada pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) baik secara parsial maupun simultan.

